

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory merupakan hubungan antara dua pihak yaitu *principal* sebagai pemilik dan *agent* sebagai manajemen. Dimana *agent* melakukan kegiatan atas nama *principal* dan *principal* memberikan pelimpahan wewenang (delegasi) kepada agen dalam pengambilan keputusan (Setiawan, 2016).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Manajer perusahaan selaku agen memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Namun di sisi lain, manajer juga berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dengan informasi yang dimilikinya untuk membuat keputusan. Kemudian masalah keagenan dapat timbul karena adanya harapan dari *principal* untuk memperoleh pengembalian maksimal atas investasinya, yang berbeda dengan harapan manajer. Bagaimanapun, manajer

sebagai *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan *principal* (Irawati, 2016).

Manajer sebagai pihak yang lebih mengetahui informasi berkenaan dengan internal perusahaan dapat bertindak diluar perjanjian antara *principal* dan manajemen demi kepentingan pribadi. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki banyak kepentingan dapat mempersulit dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif untuk menghasilkan nilai yang berguna bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders* (Kartika et al., 2018).

Konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang saham dan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan managerial dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak dapat secara langsung dan efektif mengendalikan manajemen. Menurut (Saksakotama, 2014), teori agensi menggunkan tiga asumsi sifat manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan mengutamakan kepentingan pribadinya.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer mempunyai

kewajiban untuk memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena dengan kondisi yang paling besar ketidakpastiannya, misalnya kurang dalam penguasaan informasi dalam sebuah perusahaan. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata mata mementingkan kepentingannya sendiri. Agen mungkin akan takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut (Arista, 2018).

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham),

sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*) (Nicolin dan Sabeni, 2013).

Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku *agent* apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi *principal* yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor melakukan pengawasan terhadap pengawasan agen melalui laporan keuangan (Saksakotama & Cahyonowati, 2014).

2. Integritas Laporan Keuangan

Hardiningsih (2010), integritas adalah jujur dan apa adanya. Laporan keuangan yang memiliki integritas adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembuyikan. Integritas laporan keuangan adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias serta secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan.

Dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembuyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk

dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Savero, 2017).

Martani (2012) menjelaskan bahwa informasi keuangan memiliki kualitas *reliability* jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*). Sedangkan informasi keuangan yang *relevance* berarti laporan keuangan dapat bermanfaat untuk mempengaruhi keputusan para pemakai.

Zhou dan Yang (2016) menyatakan secara intuitif ukuran integritas laporan keuangan dapat dibagi menjadi 2 yakni diukur secara konservatisme atau manajemen laba. Meski demikian, pihak auditor lebih tertarik pada pelaporan keuangan yang bersifat konservatif (Jiazhen dan Kun, 2016) . Hal ini disebabkan karena karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme dapat digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan.

Selain itu, Indeks konservatisme digunakan dengan alasan keidentikan konservatisme yang menyajikan laporan keuangan yang *understate* yang memiliki risiko lebih kecil dibanding laporan keuangan yang *overstate*. Sehingga prinsip konservatisme dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan (Fajaryani, 2015). Laporan keuangan yang *understate* dinilai akan

lebih *reliable* dan memenuhi karakteristik utama informasi dalam laporan keuangan, sehingga cenderung lebih berintegritas (Arista, 2018).

2.1 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan ketika adanya kemungkinan rugi atau penurunan aset (peningkatan kewajiban) segera diungkapkan. Namun ketika kemungkinan terjadi laba atau peningkatan aset (penurunan kewajiban) perusahaan menunda untuk mengungkapkan. Dengan adanya penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh penyusun. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Riri, 2014).

Manipulasi yang paling sering dilakukan adalah *overstate* laba. Hal ini karena laba dapat mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan menjadi perhatian bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai perusahaan. Kinerja perusahaan akan mempengaruhi harga saham, sehingga menjadi alasan tambahan bagi manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan apabila tidak mampu mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari manipulasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan prinsip akuntansi konservatif (Yulinda et al., 2016).

Konservatisme merupakan prinsip yang kontroversial dalam praktik akuntansi. Di satu sisi, penerapan prinsip konservatisme akuntansi, menyatakan konservatisme bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang bisa meminimalkan timbulnya *agency cost*. Di sisi lain pihak yang kontra, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara beban yang dikeluarkan dengan pendapatan yang akan diperoleh. Bahkan ketika perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akan berdampak pada periode selanjutnya. Pada periode pertama biaya yang dikeluarkan perusahaan akan meningkat, sehingga laba menurun. Sedangkan pengakuan pendapatan terjadi pada periode kedua yang akan meningkatkan nilai laba. Oleh karena itu beberapa peneliti tidak setuju dengan penerapan prinsip konservatisme (Setiawan, 2016).

Namun praktik akuntansi konservatif masih diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, hal ini disebabkan oleh tiga faktor, faktor pertama yaitu perusahaan masih tetap menghadapi ketidakpastian ketika menyiapkan saldo pada laporan keuangan yang menggunakan nilai wajar atau *fair value*. Faktor kedua, sebagai solusi untuk mengatasi perilaku manajer yang *opportunistic*. Faktor ketiga, masih adanya pilihan metode akuntansi yang terdapat dalam SAK yang akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga penerapan prinsip konservatif masih diperlukan (Saksakotama & Cahyonowati, 2014).

Watts (2003) membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan (Enni, 2016) :

A. *Earning/Stock Return Relation Measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*.

B. *Earning/Accrual Measures*

1. Model Givoly dan Hayn (2000)

Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin

konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam *net income* tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

2. Model Zhang (2007)

Zhang (2007) menggunakan *conv_accrual* sebagai salah satu pengukuran konservatisme. *Conv_accrual* didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya Zhang (2007) mengalikan *conv_accrual* dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi nilai *conv_accrual* menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

3. *Discretionary Accrual*

Model akrual lainnya yang juga dapat digunakan sebagai pengukuran konservatisme adalah model *discretionary accruals* (Winata, 2008 dalam Dachi, 2010). Terdapat beberapa model untuk menghitung *Discretionary Accrual*. *Discretionary Accrual* yang paling sering digunakan adalah *discretionary accrual* model Kasznik (1999). Kasznik (1999) memodifikasi model Dechow et al. (1995) dengan memasukkan unsur selisih arus kas operasional (ΔCFO) untuk mendapatkan nilai akrual non-diskresioner dan akrual diskresioner. Karena Kasznik (1999) berpendapat bahwa perubahan arus kas dari hasil operasi perusahaan akan berkorelasi negatif dengan total akrual.

C. *Net Asset Measure*

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang understatement dan kewajiban yang overstatement. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

3. Struktur *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan aturan, standar, dan organisasi dalam sebuah perekonomian yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, dan manajer dimana akan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada investor luar perusahaan meliputi pemegang saham dan pemberi pinjaman. Pada prinsipnya tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan (Istiantoro et al., 2018).

Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme *good corporate governance* yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, dan kedua kewajiban perusahaan adalah melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik seharusnya sudah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Dendy Oktavian Pratama, 2015).

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparency adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian (*Independence*)

Kemandirian adalah Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsi-prinsip GCG tersebut secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hubungan yang harmonis antara pemilik dana (*principal*) dengan pengguna atau pengelola dana (*management*) yang berlandaskan kepercayaan yang tumbuh dari adanya praktik CGC akan menjamin kemudahan akses dana,

penunjang investasi dan kegiatan usaha bagi perusahaan (Istiantoro et al., 2018).

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran *corporate governance* adalah:

3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi jumlah saham pada akhir periode akuntansi yang dimiliki oleh pihak eksternal seperti institusi atau lembaga, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank atau institusi lain (Bukhori, 2012). Proporsi saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri (Susiana dan Herawaty, 2007). Jadi, Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri (Savero, 2017).

Tingginya tingkat kepemilikan saham oleh manajerial dapat berdampak buruk terhadap perusahaan, hal ini dikarenakan manajer memiliki hak suara yang besar atas kepemilikannya yang tinggi, sehingga manajer memiliki posisi yang lebih kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Akibatnya pihak eksternal yang memiliki saham minoritas akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer, hal ini akan memicu masalah agensi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, (Saksakotama & Cahyonowati, 2014) menganjurkan pentingnya suatu mekanisme pengawasan dalam perusahaan.

Hal ini dikarenakan dengan adanya pengawasan tersebut maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan tidak memihak dan integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut yaitu dengan mengaktifkan *monitoring* melalui investor-investor institusional. Dengan kepemilikan institusional oleh perusahaan maupun lembaga lain, akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. Dan tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Irawati, 2016).

3.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana & Herawaty, 2007). Kepemilikan manajerial juga dapat berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan membuat manajemen memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola perusahaan dan

menyajikan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan dan masalah agensi. Manajer yang memiliki saham di perusahaan akan merasa bahwa perusahaan tersebut juga dimiliki olehnya, dengan demikian manajer akan melaporkan laporan keuangan dengan benar dan jujur sehingga laporan keuangan tersebut mempunyai integritas yang tinggi (Setiawan, 2016).

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab manajemen yang lebih besar dalam menjalankan amanah untuk mengelola perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Istiantoro et al., 2018).

3.3 Komite Audit

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal, penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta mengevaluasi, menilai dan memutuskan apakah sebuah laporan keuangan layak diterbitkan atau tidak. Semakin banyak jumlah komite audit akan semakin besar tekanan kepada manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas (Yulinda et al., 2016).

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Vera et al., 2016).

Banyaknya anggota komite audit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas dari perusahaan dimana dalam banyak peraturan, aturan minimum anggota komite audit perusahaan adalah sebanyak tiga orang tetapi dari *specific best practise suggestion* yang disebutkan oleh (Rezaee, 2009) anggota komite audit adalah setidaknya lima orang.

Persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2012):

1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
3. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki kemampuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum maupun pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit maupun jasa konsultasi lain dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Emiten maupun Perusahaan Publik.
7. Tidak memiliki saham Emiten maupun Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung.
8. Bukan merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Emiten maupun Perusahaan Publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat.
9. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan Direksi, komisaris dan pemegang saham utama Perusahaan.

10. Salah satu anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Untuk menerapkan *good corporate governance*, perusahaan membentuk komite audit yang independen, komite audit ini merupakan bagian dari internal perusahaan. Komite audit dimaksudkan agar pihak manajemen mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan secara benar agar dapat berguna pada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengungkapan informasi ini melindungi para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi mereka. Selain itu, komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen. Adanya kontribusi komite audit dalam kualitas pelaporan keuangan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Setiawan, 2016).

3.4 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Rizki, 2018).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Adanya keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Istiantoro et al., 2018).

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris (Savero, 2017) meliputi :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparancy*) dan adil (*fairness*).

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris.
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggung jawaban (*responsibility*).
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan OECD (*Principles of Corporate Governance*).

Manfaat adanya komisaris independen dalam teori keagenan dapat meningkatkan transparansi terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meminimalkan adanya tindakan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi manajemen. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen akan cenderung berintegritas dengan keberadaan komisaris independen didalamnya, karena bagian ini berfungsi mengawasi manajemen dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Astria, 2011). Dengan adanya komisaris independen sebagai pihak independen yang mengawasi kinerja manajemen, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berintegritas.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Penulis: Istiantoro, I., Paminto, A., & Ramadhani, H. Judul: Pengaruh <i>Struktur Corporate Governance</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI. <i>Akuntabel</i> Tahun: 2018 Volume: 14 No: 2 Halaman: 157	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Komisaris Independen.	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
2	Penulis: L.Irawati Judul: Pengaruh Kualitas Audit dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Kompertemen Tahun: 2016. Volume: XIV No: 1 Halaman: 90-106	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional.	Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan, Komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan .

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
3	Penulis: Dendy Oktavian Pratama Judul: Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. Artikel Ilmiah Tahun: 2015	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit.	Komite audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komisaris Independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
4	Penulis: Andry Priharta Judul: Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Tahun: 2017 Volume: 3 No: 4 Halaman: 234-250	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit.	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan, sementara komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
5	Penulis: Yulinda, N., Nasir, A., & Idrus, R. Judul: Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Pergantian Auditor, Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan. JOM Fekon Tahun: 2016 Volume: 3 No: 1 Halaman: 419-433	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Leverage</i> , Pergantian Auditor, Spesialisasi Industri Auditor.	Komisaris independen, komite audit, <i>leverage</i> , pergantian auditor berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sementara spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
6	Penulis: Sari Dewi dan Dwiana Putra. Judul: Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Pada Integritas Laporan Keuangan. Tahun: 2016 Volume: 15 Halaman: 2269-2296	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komisaris independen, komite audit.	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.
7	Penulis: Atik Fajaryani Judul: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan. Jurnal Nominal Tahun: 2015 Volume: 4 No: 1	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Spesialisasi Industri Auditor.	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Integritas Laporan Keuangan, Spesialisasi Industri Auditor berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan.
8	Penulis: Nurjannah, L., & Pratomo, D. Judul: Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Tahun: 2014 Volume: 1 No: 3 Halaman: 99-105	Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Komite Audit, Komisaris Independen, Kualitas Audit.	Komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
9	<p>Penulis: Arista, S. Judul: Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> Dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Tahun: 2018 Volume: 12 No: 2 Halaman: 81-98</p>	<p>Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional, Komite Audit, Audit Tenure.</p>	<p>Komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu kepemilikan instiusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dan audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p>
10	<p>Penulis: Tussiana, A. A., & Lastanti, H. S. Judul: Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Spesialisasi Industri Auditor Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Media Riset Akuntansi, <i>Auditing</i> dan Informasi. Tahun: 2017 Volume: 16 No: 1 Halaman: 69</p>	<p>Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Independensi, Kualitas Audit, Spesialisasi Industri Auditor, <i>Corporate Governance</i>.</p>	<p>Independensi, <i>corporate Governance</i> dan spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p>
11	<p>Penulis: Rahmawati, M., & Wahyuningsih, S. Judul: Analisis Pengaruh Ukuran Kap Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. JBE Tahun: 2018 Volume: 3 No: 1 Halaman: 22-30</p>	<p>Y: Integritas Laporan Keuangan. X: Ukuran KAP, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional.</p>	<p>Ukuran KAP dan kepemilikan instiusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara, komite audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
12	Penulis: Zabihollah Rezaee Judul: Corporate Governance Role In Financial Reporting. Tahun: 2004 Research in Accounting, Volume: 17 Halaman: 107-149	Y : Financial Reporting. X : sight, managerial, compliance, audit, advisory, assurance, and monitoring functions.	Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari fungsi mekanisme yang saling terkait berpengaruh positif dalam laporan keuangan yang andal, karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.
13	Penulis: Ahsan Habib dan Haiyan Jiang. Judul: Corporate governance and financial reporting quality. Tahun: 2015 Journal of International Accounting, Auditing and Taxation	Y : financial reporting quality. X : Share holders, board of directors.	Pemegang saham dan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan mengeluarkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan kata lain, laporan keuangan harus disajikan dengan integritas yang tinggi. Pada kenyataannya, kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi telah meningkat beberapa tahun ini terakhir ini, dimana hal

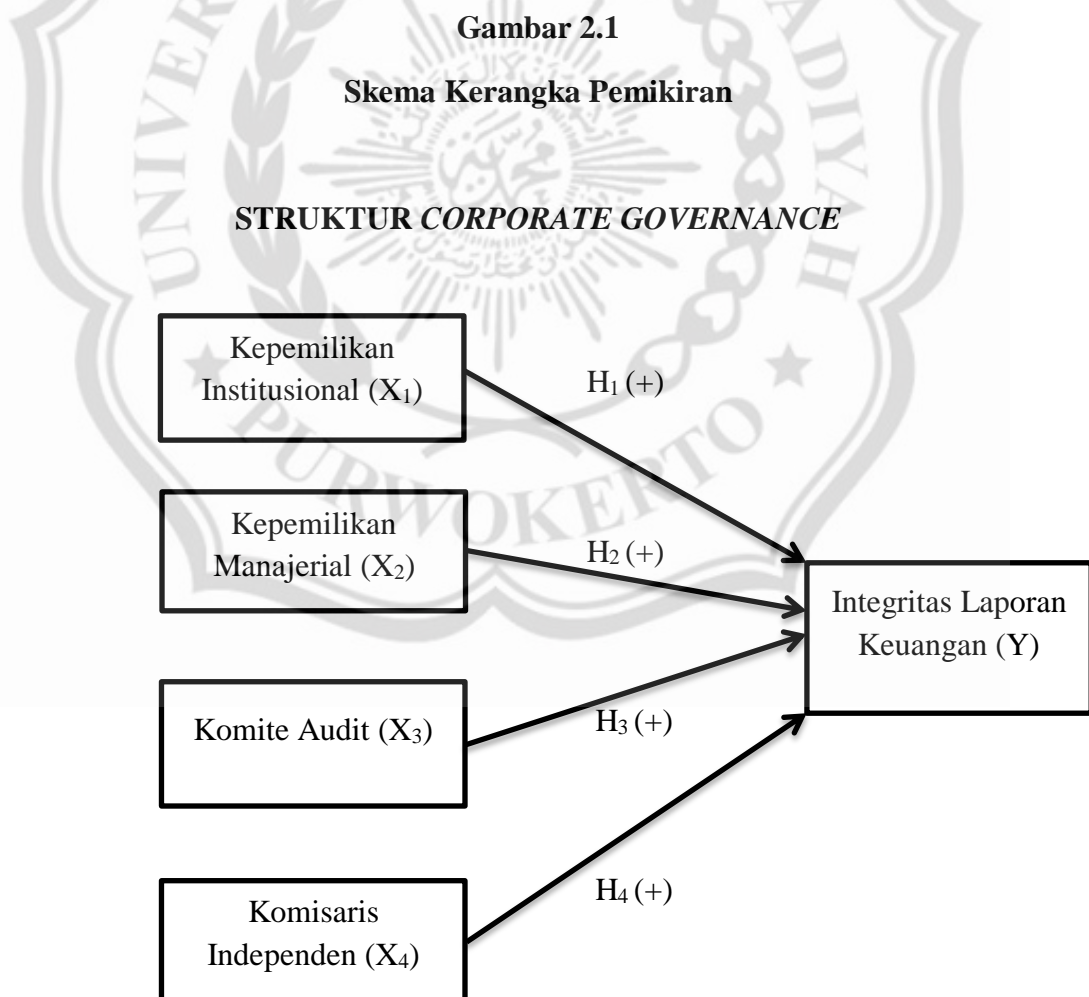
tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Timbulnya kasus-kasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan bagi banyak pihak. Beberapa diantaranya adalah mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Nicolin dan Sabeni, 2013).

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penerapan tata kelola yang baik dapat menghasilkan integritas laporan keuangan yang terpercaya. Struktur *corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen. Adanya kepemilikan institusional, sebagai salah satu pengukuran struktur *corporate governance*, memiliki tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi dimana terdapat kekuasaan tunggal suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan kepemilikan manajerial berfungsi sebagai penyeimbang dalam kepemilikan saham. Adanya keikutsertaan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat tercapai kinerja perusahaan yang diharapkan dan meningkatkan integritas laporan keuangan (Saksakotama & Cahyonowati, 2014).

Integritas laporan keuangan sebuah perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh adanya komite audit, komisaris independen dalam perusahaan. Komite audit bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan lebih jujur sehingga integritas laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Sedangkan

komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Perusahaan yang memiliki komisaris independen cenderung akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berintegritas karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan (Dewanti, 2011).

Berdasarkan landasan teori, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



2. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri (Savero, 2017). Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga integritas laporan keuangan terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengawasan tersebut maka manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Irawati, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Verya et al., 2016), (Yulinda et al., 2016), (Savero, 2017), dan (Pratama & Pujiati, 2015) yang menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan

keuangan. Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan *monitoring* terhadap perilaku manajer selaku *agent* dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan. Sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik yang terjadi antara *principle* dan *agent*, meningkatkan kejujuran dan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana & Herawaty, 2007). Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab manajemen yang lebih besar dalam menjalankan amanah untuk mengelola perusahaan (Istiantoro et al., 2018).

Dengan demikian, manajer pada perusahaan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perusahaan, mengambil

keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan menyajikan laporan keuangan secara jujur dan benar sehingga laporan keuangan menjadi lebih berintegritas. Penelitian (Arista, 2018), (Rizki, 2018), (Savero, 2017) dan (Istiantoro et al., 2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan.

2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Dibentuknya komite audit bertujuan untuk memelihara independensi auditor internal, penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta mengevaluasi, menilai dan memutuskan apakah sebuah laporan keuangan layak diterbitkan atau tidak. Semakin banyak jumlah komite audit akan semakin besar tekanan kepada manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas (Yulinda et al., 2016).

Penelitian (Istiantoro et al., 2018) menyatakan Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Arista, 2018), (Yulinda et al., 2016) dan (Pratama, 2015). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah proporsi anggota komite audit mampu mengurangi konflik agensi yang timbul

akibat hubungan keagenan. Jumlah anggota komite audit yang besar mampu mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai nilai perusahaan yang tinggi dengan cara menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi dapat tercapai. Maka dari itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Rizki, 2018).

Komisaris independen dapat berperan sebagai penengah apabila terjadi perselisihan diantara para manajer internal serta mengawasi kebijakan-kebijakan dan memberikan nasihat kepada manajer. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan mengurangi risiko kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Arista, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Penelitian (Octavia, 2013), (Savero, 2017), (Priharta, 2017), dan (Saksakotama, 2014) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap integritas laporan keuangan. Oleh sebab itu, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini ialah:

H₄ : Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

